



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2016
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR..45

Lampiran : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
 Nomor : 45 Tahun 2016
 Tanggal : 30 Desember 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)				
Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan				
Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan x 100 %	Primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah jembatan kondisi baik (aman) dibagi total jumlah jembatan x 100 %	Primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah irigasi kondisi baik dibagi total jumlah irigasi x 100 %	Primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah izin yang sesuai dengan tata ruang dibagi total izin yang diberikan X 100 %	Primer	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Persentase penurunan kawasan kumuh pada permukaan padat penduduk	Primer	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mengurangi kawasan kumuh pada permukaan Padat Penduduk	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh		Primer	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Persentase ketersediaan Terminal Tipe C	Jumlah terminal Tipe C disetiap kecamatan	Primer	Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD	
				PENANGGUNG JAWAB	
	Persentase Dermaga dalam kondisi baik	Jumlah dermaga kondisi baik (aman) dibagi total jumlah dermaga x 100 %	Primer	Dinas Perhubungan	
	Persentase kecelakaan di darat	Menurunnya jumlah kecelakaan darat setiap tahunnya	Sekunder	Dinas Perhubungan	
	Persentase kecelakaan di air	Menurunnya jumlah kecelakaan air setiap tahunnya	Sekunder	Dinas Perhubungan	
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)					
Meningkatnya produksi tanaman padi	Provititas tanaman padi (ton/Ha)	Kemampuan suatu lahan (Ha) untuk menghasilkan tanaman padi (ton)	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
Meningkatnya produksi tanaman palawija	Provititas Tanaman jagung (ton/Ha)	Kemampuan suatu lahan (Ha) untuk menghasilkan tanaman jagung (ton)	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan	Provititas tanaman semangka (ton/Ha)	Kemampuan suatu lahan (Ha) untuk menghasilkan tanaman semangka (ton)	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	Peningkatan populasi ternak setiap tahunnya	Primer	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
Meningkatnya produksi daging	Jumlah peningkatan daging Ruminansia (Kg)	Peningkatan produksi daging ruminansia	Primer	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani / NTUP	Rasio indeks yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks yang dibayarkan petani hanya untuk pengeluaran usaha pertanian	Primer	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai banyak ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi	Primer	Dinas Ketahanan Pangan	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai kandungan rata-rata konsumsi ideal	Primer	Dinas Ketahanan Pangan	
	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	Nilai energi ideal yang dikonsumsi	Primer	Dinas Ketahanan Pangan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi ikan hasil dari sektor budidaya	primer	Dinas Perikanan
	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi ikan hasil dari sektor tangkap	primer	Dinas Perikanan
	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	Jumlah produksi ikan yang diolah	primer	Dinas Perikanan
Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/Kapita)	Jumlah konsumsi ikan masyarakat per kepala	primer	Dinas Perikanan
	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah IKM yang aktif	primer	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan Berdaya Saling	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	Persentase meningkatnya kunjungan wisata baik domestik maupun internasional	primer	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya aset yang berkualitas dan berprestasi	Peningkat POPDA	Cukup jelas	primer	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Misi III : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK				
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	APM SD /Sederajat	Jumlah penduduk usia pada jenjang SD/ sederajat sedang sekolah pada jenjang SD/ sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/ sederajat x 100 %	Sekunder	Dinas Pendidikan
			Sekunder	Dinas Pendidikan
	APM SMP /Sederajat	Jumlah penduduk usia pada jenjang SMP/ sederajat sedang sekolah pada jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/ sederajat x 100 %	Sekunder	Dinas Pendidikan
			Sekunder	Dinas Pendidikan
APK SD /Sederajat	Jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SD/ sederajat dibagi	Sekunder	Dinas Pendidikan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya sarana pendidikan dasar masyarakat	APK SMP /Sederajat	Jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/ sederajat x 100 %	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMP/ sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/ sederajat x 100 %	Sekunder	Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa menulis dibagi jumlah penduduk usia 10 tahun keatas x 100 %	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Sekunder	Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah rombangan belajar pada masing-masing SD	Sekunder	Dinas Pendidikan
	Persentase Rasio Ideal rombel SD	Perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah rombangan belajar pada masing-masing SMP	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Persentase Rasio Ideal rombel SMP	Sekunder	Dinas Pendidikan
	Angka Usia Harapan Hidup	Rata-rata kesempatan atau waktu hidup	sekunder	Dinas Kesehatan
		Banyaknya kematian bayi/ usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu	Primer	Dinas Kesehatan
meningkatkan status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)	Primer	Dinas Kesehatan
		Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi	Primer	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	Kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, disebabkan karena kehamilannya atau pengelolannya, dan bukan karena sebab lain, per 100.000 KH	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	Meningkatkan penemuan dan penanganan TB Paru BTA+	Primer	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Penyakit Kusta	Menurunnya prevalensi penyakit kusta	Primer	Dinas Kesehatan
	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	Cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Primer	Dinas Kesehatan/RSD
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan masyarakat Miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Primer	Dinas Kesehatan/RSUD
	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	Cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.	Sekunder	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Persentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi dibagi jumlah perempuan x 100 %	Primer	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Proporsi penduduk wanita usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk wanita usia kerja yaitu 15 tahun ke atas	Sekunder	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	Sekunder	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses internet	Primer	Dinas Komunikasi dan Informasi
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif	Cakupan Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis Iptek	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis IPTEK	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat	Meningkatnya kebebasan masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat	Perlindungan hukum dan penghargaan kepada pencipta atas hasil ciptaannya (yang merupakan jasil dari kekayaan intelektual berupa buah pikir dan kreasi) yang bermanfaat untuk umat manusia	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya iklim demokrasi di kabupaten Tanjung Jabung Timur	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran	persentase cakupan layanan kebakaran	Meningkatnya persentase Wilayah Manajemen Kebakaran	Primer	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	Cukup jelas	Primer	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Persentase penyelesaian sengketa lahan	Sengketa lahan yang diselesaikan dibagi total sengketa lahan x 100 %	Primer	Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	OPD
				PENANGGUNG JAWAB
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis				
Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Primer	Seluruh OPD
Meningkatnya manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Cukup jelas	Primer	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah	Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Cukup jelas	Primer	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	Capaian nilai SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB	Primer	Sekretariat Daerah
	Opini BPK	Capaian opini yang diberikan oleh BPK	Primer	Badan Keuangan Daerah
	Penyelesaian tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Primer	Inspektorat
	Predikat Nilai EPPD	Capaian nilai EPPD	Primer	Sekretariat Daerah
	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	Jumlah sasaran RPJMD yang dilaksanakan dibagi total sasaran x 100 %	Primer	Bappeda

BUPATI TANJUNGPINANG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO